

# **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN WALI DALAM PERNIKAHAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**KIRMANTO**  
**NIM. 2100155**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**

**2007**

Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
Perum Depag IV/7 Tambak Aji  
Ngalian Semarang  
Dede Rodin, Lc, M.Ag.  
Asrama Mahasiswa IAIN Walisongo  
Perum Depag RT 02/03 Tambakaji 50185

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Kirmanto

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kirmanto

Nomor Induk : 2100155

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'  
TENTANG KEHARUSAN WALI DALAM  
PERNIKAHAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juni 2007

Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D**  
**NIP. 150 238 492**

**Dede Rodin, Lc, M.Ag.**  
**NIP. 150 318 015**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Kirmanto  
NIM : 2100155  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I  
TENTANG KEHARUSAN WALI DALAM  
PERNIKAHAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**25 Juli 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2006/2007

**Ketua Sidang,**

Semarang, Juli 2007  
**Sekretaris Sidang,**

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
**NIP. 150 254 254**

**Dede Rodin, Lc, M.Ag.**  
**NIP. 150 318 015**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Drs. Agus Nurhadi, MA.**  
**NIP. 150 250 148**

**H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
**NIP. 150 279 723**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D**  
**NIP. 150 238 492**

**Dede Rodin, Lc, M.Ag.**  
**NIP. 150 318 015**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32). \*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an , *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 549.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibunda tercinta (Bapak Ngari dan Ibu Solikhatun) yang membimbing dan mengarahkan hidupku. Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- Kakak, Adik dan Keponakakku (Mas Rochim, Mbak Lastri, Adik Ari, Adik Wahyu, dan Adik Marsa), serta seluruh keluargaku memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-Teman Mawapala yang selalu memberikan support dan do'a kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, Juli 2007**

**Kirmanto**  
**NIM: 2100155**

## ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i mengharuskan adanya wali dalam pernikahan? bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan? bagaimana kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer?. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini yaitu data primer adalah karya Imam al-Syafi'i yang berjudul *al-Umm dan al-Risalah*. Sedangkan data sekunder adalah literatur lainnya yang melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research*. Analisis data menggunakan deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian dan analisis hermeneutis yaitu yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Imam al-Syafi'i, pernikahan tanpa wali maka pernikahan demikian batal, karena pernikahan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa seperti ini didasarkan pada *istinbat* hukum berupa al-Qur'an, yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nisa ayat 34, surat an-Nisa ayat 25, dan hadis dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum pernikahan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat Barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah pernikahan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG KEHARUSAN WALI DALAM PERNIKAHAN”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dede Rodin, Lc, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para Dosen Pengajar beserta staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan staff administratif yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restu nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya (Suatu Pendekatan Normatif) .....	16
B. Syarat dan Rukun Nikah .....	30
C. Wali dalam Nikah .....	38
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya .....	38
2. Macam-Macam Wali .....	43
3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	46
D. Urgensi Wali dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis .....	48
E. Istibat Hukum Yang Terkait dengan Keharusan Wali dalam Pernikahan .....	54

**BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN  
WALI DALAM PERNIKAHAN**

- A. Biografi Imam al-Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya ..... 66
- B. Karakteristik Pemikiran Imam al-Syafi'i Ditinjau  
Dari Dimensi Sosio-historis-kultural ..... 73
- C. Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i  
tentang Keharusan Adanya Wali Dalam Pernikahan ..... 85

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG  
KEHARUSAN WALI DALAM PERNIKAHAN**

- A. Analisis Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum  
Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Wali dalam Pernikahan . 91
- B. Kontekstualisasi Pendapat Imam al-Syafi'i tentang  
Keharusan Wali dalam Pernikahan terhadap  
Hukum Pernikahan Kontemporer ..... 106

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 115
- B. Saran-saran ..... 116
- C. Penutup ..... 116

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirmanto  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 07 Pebruari 1980  
Alamat Asal : Desa Mororejo RT 04 RW 08 Kaliwungu Kendal  
Pendidikan : - MI Mororrejo 01 lulus tahun 1993  
- MTs NU Bonang Demak lulus tahun 1996  
- MAN 02 Bangetayu Semarang lulus tahun 1999  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kirmanto**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis.

Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>1</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon laki istri

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>2</sup> Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>3</sup> Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.<sup>4</sup>

As Shan'ani dalam kitabnya "*Subul al-Salam*" memaparkan bahwa *al-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

<sup>3</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

<sup>4</sup>Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

<sup>5</sup> Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكتي أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني". (متفق عليه).<sup>6</sup>

Artinya : Dari Anas : sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: “aku tidak akan menikah”. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: “aku akan selalu shalat dan tidak tidur”. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: “aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka”. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaq A'laih)

Dari hadits di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Karena itu menikah merupakan bagian dari sunnah Rasul.

---

<sup>6</sup>Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tt, hlm. 171.

Dalam hubungannya nikah tanpa wali, bahwa dalam prakteknya tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang tidak direstui orang tuanya sehingga mengambil jalan pintas dengan cara menikah tanpa wali. Dalam kaitan ini ada hadits yang menegaskan sebagai berikut :

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي". (رواه احمد والامام الخمسة الا النسائي)<sup>7</sup>

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Karena itu kedudukan wali merupakan salah satu rukun akad pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan itu menjadi rusak. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya keberanian muda-mudi melakukan nikah tanpa wali dan hal itu bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Salah seorang ulama di Indonesia Ahmad Hassan dalam bukunya *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>8</sup>Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

Sehubungan dengan keterangan tersebut, *Fiqih Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut menguraikan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.<sup>9</sup>

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحّة النّكاح ام ليست بشرط؟ فذهب مالك الى أنّه لا يكون نكاح الا بوليّ, وأنها شرط فالصّحة فرواية أشهب عنه, وبه قال الشّا فعي.<sup>10</sup>

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah, Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

<sup>10</sup>Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 6.



...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya:”Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka” (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>11</sup>

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunnat hukumnya, dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang pernikahannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita itu boleh mewakili kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya pernikahan, bukan syarat kelengkapan.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadits pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai alasan oleh

---

<sup>11</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentaftir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm 57.

fuqaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.<sup>12</sup>

Pandangan di atas, berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قال الشافعي: فأى امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن  
النبي صلى الله عليه وسلم قال "فنكاحها باطل"<sup>13</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: wanita manapun yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka tiada pernikahan bagi wanita tersebut. Karena Nabi Saw. bersabda: "maka nikahnya itu batal"

Masalah yang muncul yaitu apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i mengharuskan adanya wali dalam akad nikah. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks nikah harus dengan wali.

Menariknya tema ini adalah karena masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, atau menggunakan wali yang salah. Adapun sebabnya memilih tokoh Imam al-Syafi'i adalah karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia. Demikian pula kitabnya *al-Umm* dan *al-Risalah* menjadi rujukan primer. Hal itu bukan saja terjadi di kalangan akademisi namun di pesantren-

<sup>12</sup> Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 410

<sup>13</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 14.

pesantren pun kitab tersebut dianggap sebagai kitab standard. Atas dasar inilah mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Wali dalam Pernikahan*.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i mengharuskan adanya wali dalam pernikahan?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan?
3. Bagaimana kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum pernikahan kontemporer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i mengharuskan adanya wali dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan terhadap hukum pernikahan kontemporer.

## **D. Telaah Pustaka**

Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis baru menemukan satu

skripsi yang temanya tentang wali, yaitu skripsi yang disusun oleh Rosalin (Tahun 2005) dengan judul: *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*.<sup>14</sup> Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A.Hassan.

Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sini pun Ahmad Hassan keliru, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus memakai wali.

Adapun beberapa kitab atau buku yang mengungkapkan tentang kedudukan wali dalam pernikahan dapat disebutkan di bawah ini :

---

<sup>14</sup>Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan ), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

1. *Fikhus Sunnah* disusun oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini dijelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.<sup>15</sup>
2. *Al-Muwatta'* hasil karya Imam Malik ibn Anas. Kitab ini merupakan kitab fiqh yang pada dasarnya berisi hadits-hadits yang cukup baik untuk dikaji dan direnungi. Dalam kitab tersebut diungkapkan pula masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>16</sup>
3. *Fath al- Mu'in*, disusun oleh Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. Dalam kitab ini terdapat pula pembahasan tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam pernikahan. Karena itu wali menjadi bagian dari rukun pernikahan disamping rukun lainnya seperti ada calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul.<sup>17</sup>
4. *Fath al-Qarib* disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. Kitab ini pun menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

<sup>16</sup>Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tth, hlm.121.

<sup>17</sup>Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al- 'Uyun*, Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera , tth, hlm. 72.

antaranya dijelaskan bahwa wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.<sup>18</sup>

5. *Fiqih Wanita* hasil karya Ibrahim Muhammad al-Jamal. Dalam buku ini diungkapkan pula beberapa hadits yang menegaskan tidak sahnya nikah jika tanpa wali.<sup>19</sup>
6. *Fiqih Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.<sup>20</sup>
7. *Hukum-Hukum Fiqih Islam* hasil karya TM Hasbi Ash-Shiddiqie. Dalam buku ini dijelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali yang lelaki.<sup>21</sup>

Dengan demikian bahwa skripsi ini belum ada yang membahas.

---

<sup>18</sup>Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-Ihya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 22.

<sup>19</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 19960, hlm. 34.

<sup>20</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

<sup>21</sup> TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 223.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Yang terakhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.<sup>23</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research*

---

<sup>22</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134. dapat dilihat juga dalam. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

<sup>23</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

(penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Imam al-Syafi'i dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam al-Syafi'i sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.<sup>24</sup>. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam al-Syafi'i tentang wali dalam nikah.

---

<sup>24</sup>Arief Fuchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 – 64



Di samping itu digunakan pula *hermeneutika* yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks Kitab *al-Umm* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, wali dalam nikah (pengertian wali dan dasar hukumnya, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan).

Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan wali dalam pernikahan yang meliputi biografi Imam al-Syafi'i, pendidikan dan

---

<sup>25</sup>Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

karya-karyanya, karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i ditinjau dari dimensi sosio-historis – kultural, pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan wali dalam pernikahan yang meliputi analisis pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan wali dalam pernikahan, kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan wali dalam pernikahan terhadap hukum pernikahan kontemporer.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG WALI**

### **DALAM PERNIKAHAN**

#### **A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya (Suatu Pendekatan Normatif)**

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.<sup>1</sup> Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar

---

<sup>1</sup>Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>3</sup>

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikh* ( النكاح ) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* ( الزواج- الزواج- الزيجه ). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al- wath'u* ( الوطاء ), *adh-dhammu* ( الضم ) dan *al-jam'u* ( الجمع ). *Al- wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* ( وطأ- يطأ- وطأ ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2.

dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>4</sup> *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu – dhamman* ( ضم- يضم- ضما ) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>5</sup>

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* ( جمع- يجمع- جمعا ) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.<sup>6</sup>

Sebutan lain buat pernikahan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* ( زاج- يزوج- زوجا ) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* ( تزوج- يزوج- تزويجا ) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" ( فَعَلَ- يَفْعَلُ- تَفْعِيلًا ) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

<sup>5</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 43-44.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.<sup>8</sup>

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.<sup>9</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>10</sup> Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya."<sup>11</sup>

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah atau belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah

---

<sup>8</sup>Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

<sup>9</sup>Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

<sup>10</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38.

<sup>11</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 1-4.

mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau pernikahan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam".<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>13</sup>

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Pernikahan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Pernikahan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau. ,
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.



- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.<sup>14</sup>

Adapun dasar hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 2.

<sup>15</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).<sup>16</sup>

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).<sup>17</sup>

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 549.

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 644.

فإنَّه أغضَّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم فإنَّه له وجاء". رواه الجماعة.<sup>18</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " ردَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم على عثمان بن مظعون التَّبتُّ ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم)<sup>19</sup>

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النَّبي صَلَّى الله عليه وسلَّم قال بعضهم: لا أتزوَّج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النَّبي صَلَّى الله عليه وسلَّم فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكَّني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوَّج النساء فمن رغب عن سنَّتي فليس مِنِّي". (متفق عليه)<sup>20</sup>

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan

<sup>18</sup>Muhammad Asy Syaikhani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 171

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 171

sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا، قال: تزوّج فإنّ خير هذه الأمّة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)<sup>21</sup>

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن التّبّتلّ", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).<sup>22</sup>

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulk meriwayatkan hadits ini dari

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.

Para Fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan

Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.<sup>23</sup>

Adapun Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu.<sup>24</sup>

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

---

<sup>23</sup>Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

<sup>24</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14-16

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.<sup>25</sup>

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (masnikah) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 14.

istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.<sup>26</sup>

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut

---

<sup>26</sup>Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.



palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.<sup>27</sup>

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>28</sup>

## **B. Syarat dan Rukun Nikah**

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun

---

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 16

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 16.

terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>29</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>30</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>31</sup> melazimkan sesuatu.<sup>32</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>33</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>34</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>35</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>31</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>32</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

<sup>33</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>34</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>35</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>36</sup>

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>37</sup>

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

---

<sup>36</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

<sup>37</sup>Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.<sup>38</sup>

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

---

<sup>38</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.<sup>39</sup>

5. *Ijab* dan *Qabul*.

*Ijab* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

---

<sup>39</sup>Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."<sup>40</sup>

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>41</sup>Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.<sup>42</sup>
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

#### Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
  - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*".  
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
  - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".<sup>43</sup>
- 2). Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.

---

<sup>42</sup>Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

<sup>43</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".<sup>44</sup>
  - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
  - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"<sup>45</sup>
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak

---

<sup>44</sup>Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 26.

<sup>45</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.



perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".

- b. *Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan"*. Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".<sup>46</sup>

### C. Wali dalam Nikah

#### 1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) seperti dalam penggalan ayat *waman yatwallallahu wa-rasulahu* dan kata-kata *ba'dhuhum awliya'u ba'dhin*. Ayat 61 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالى) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "*tawalliy al-amr*" (mengurus/menguasai sesuatu).<sup>47</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrahman al-

---

<sup>46</sup> Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

<sup>47</sup> Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 134

Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.<sup>48</sup> Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>49</sup>

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-'adli*. Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* (الولية) dan jamaknya *al-awliya* الاولياء ( ), berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (ولى-يلى-وليا- ), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

---

<sup>48</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 22.

<sup>49</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi waf-mali ma'an*).<sup>50</sup>

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta- kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>51</sup>

Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

---

<sup>50</sup>Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm.134-135

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya Wali Nikah dalam akad pernikahan dan wanita tidak boleh menikahi dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad pernikahan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya Wali Nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh menikahkan dirinya dengan izin walinya.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).<sup>52</sup>

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. (رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن  
المديني والترمذي وابن حبان وأعله بإرساله)<sup>53</sup>

Artinya: Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh

<sup>52</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

<sup>53</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm. 117

Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnu Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

Sabda Nabi s.a.w:

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. (أخرجه الاربعة الا النسائي , وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)<sup>54</sup>

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Diriwayatkan:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتزوّج المرأة المرأة , ولا تزوّج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات)<sup>55</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. „wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

<sup>54</sup>Ibid, hlm. 117 – 118

<sup>55</sup>Ibid, hlm. 119 – 120.

## 2. Macam-Macam Wali

Dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam Wali Nikah, yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Mu'tiq, yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seseorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.
3. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain. .
4. Wali Muhakkam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.

4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
8. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
9. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
10. Anak laki-laki paman sekandung.
11. Anak laki-laki paman seayah.
12. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
13. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah.<sup>56</sup>

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan

---

<sup>56</sup>Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 29-31.

saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:

1. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali Aqrab orang yang fasiq.
3. Wali Aqrab belum baligh.
4. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
5. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila:

1. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
2. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya. .
4. Walinya sakit pitam (ayan Jw.). .
5. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
6. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
7. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
8. Walinya bersembunyi (tawari).
9. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzuz).
10. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah ('adlal).



11. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

### 3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.<sup>57</sup> Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>58</sup>

Fiqh *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.<sup>59</sup>

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

---

<sup>57</sup>Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

<sup>58</sup>Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tt, hlm.121.

<sup>59</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحّة النّكاح ام ليست بشرط؟ فذهب مالك الى أنّه لا يكون نكاح الا بوليّ, وأنها شرط فالصّحة فرواية أشهب عنه, وبه قال الشّا فعيّ.<sup>60</sup>

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>61</sup>

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan

<sup>60</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiiil, juz II, 1409H/1989M, hlm. 6.

<sup>61</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1978), hlm 57.

bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang pernikahannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya pernikahan, bukan syarat kelengkapan.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadits pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.<sup>62</sup>

#### **D. Urgensi Wali dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu

---

<sup>62</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 410.

ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat. al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا  
أَعْجَبَكُمْ (البقرة: 221)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (2): 221).<sup>63</sup>

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
(البقرة: 232)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).<sup>64</sup>

Surat.an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk nikah) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. an-Nur (24): 32).<sup>65</sup>

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk nikah, ayat kedua larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga

<sup>63</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 53.

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 549.

suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khithab Allah berkenaan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan nikah dan menikahkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat mi pernikahan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam pernikahan.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talaq kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah nikah dengan suami lain.<sup>66</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة: 232)

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 56.

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).<sup>67</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 234)

Artinya: Bila telah sampai iddahnya tidak ada halangannya bagimu. Terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.<sup>68</sup>

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya nikah). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari pernikahan itu-adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

<sup>67</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

- a. Hadits Nabi dari Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits kecuali an-Nasa'i bunyinya:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي ". (رواه احمد و الامام الخمسة الا النسائي)<sup>69</sup>

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR. Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

- b. Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasai

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه احمد)<sup>70</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal. (HR. Ahmad).

- c. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

<sup>69</sup>Ibid., hlm. 193.

<sup>70</sup>Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadits No. 1670 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).



رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ  
الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (ابن ماجه)<sup>71</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Jamil bin al-Hasan al-Atakki dari Muhammad bin Marwan al-'Uqaili dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah).

#### E. Istinbat Hukum yang Terkait dengan Keharusan Wali dalam Pernikahan

Menurut Imam al-Syafi'i, wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah wali dalam pernikahan adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa (*al-'aqilah-al-balighah*) bisa menikahkan dirinya sendiri.

Penulis melihat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang kedudukan wali dalam pernikahan disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan ketentuan normatif baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Perbedaan itu lahir karena kerangka metodologis yang digunakan berbeda sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Berikut ini pemetaan perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan argumentasi yuridis (dalil) masing-masing.

1. Pendapat ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan dan menjadikannya sebagai rukun pernikahan dan pernikahan tanpa adanya

---

<sup>71</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadits No. 1750 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

wali dianggap tidak sah adalah Imam al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan Malik ibn Anas<sup>72</sup> yang mendasarkan pada dalil: Dalil al-Qur'an berikut ini:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (البقرة: 221)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sehingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah: 221).<sup>73</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>74</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan orang-orang yang shalih di antara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. (QS. an-Nur: 32).<sup>75</sup>

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.

<sup>72</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 147-148.

<sup>73</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 53.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 549.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:...., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".<sup>76</sup>

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelas sekali bahwa *khitab* pada lafaz "*fala ta'dhuluhunna*" adalah para wali. Dengan demikian posisi seorang perempuan dalam hal pernikahan berada pada kekuasaan walinya. Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.<sup>77</sup> Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akal nya

---

<sup>76</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, hlm. 13.

<sup>77</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 7

(*nugshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam bertasharruf sama dengan orang tidak mampu mengelola hartanya.<sup>78</sup>

Hadits Rasulullah:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي". (رواه الامام الخمسة الا النسائي)<sup>79</sup>

Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها.(أخرجه الاربعة الا النسائي , وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)<sup>80</sup>

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hadits Rasulullah:

<sup>78</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 149 – 150.

<sup>79</sup>Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaekani, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 193.

<sup>80</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات)<sup>81</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

Semua Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

2. Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.<sup>82</sup> Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Dasar al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 119 – 120.

<sup>82</sup>Ridwan, *op. cit.*, hlm. 151.

kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>83</sup>

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.<sup>84</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah: 230).<sup>85</sup>

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa perlu persetujuan walinya.<sup>86</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 234)

Artinya: Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka

<sup>83</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>84</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>85</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>86</sup> Mahmud Ali as-Sarthawi, *loc.cit.*,

(perempuan) lakukan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 234).<sup>87</sup>

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu* (sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.<sup>88</sup>

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.<sup>89</sup> Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.<sup>90</sup>

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan perangkat metodologi deduksi analogis (*qiyas*) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk

---

<sup>87</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56

<sup>88</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 151 – 152..

<sup>89</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 118

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu'.<sup>91</sup>

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.<sup>92</sup>

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Al-Qur'an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw:

---

<sup>91</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 154 – 155.

<sup>92</sup> Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيتام حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذن؟ قال: أن تسكت . (متفق عليه)<sup>93</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga di perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw;

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. (رواه مسلم) . وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. (رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان)<sup>94</sup>

Artinya :Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata: dari

<sup>93</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 118

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 119

pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan atau ragu-ragu yang perlu di terangkan :

- 1). Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
- 2). Menurut ka'idah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.
- 3). Apa maqshud perkataan Ibnul-Mundzir:<sup>95</sup>

Kita Jawab (kata A.Hassan):

- 1). Kita mengaku, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita (kata A.Hassan) dinamakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam penjagaannya mau menikah dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu buat mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.
- 2). Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di nikahkan oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.
- 3). Adapun perkataan Ibnul-Mundzir yang maksudnya: Tidak ada kelihatan khilaf antara Shahabat tentang wajib "wali" itu, tak boleh di jadikan alasan, karena di atas tadi kita sudah tahu, beberapa riwayat menerangkan kejadian nikah dengan tidak pakai wali, dan juga ada riwayat Ibnu Abi Syaibah yang mengatakan beberapa Shahabat dan Tabi'ien mempunyai anggapan tak perlu kepada wali. Saya sudah pembicaraan ini dengan pengakuan, bahwa pegangan saya hingga hari ini: "Tidak perlu wali di dalam pernikahan, tetapi sunnat saja kalau dapat penerangan yang kuat

---

<sup>95</sup>Ahmad Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT Penerbit Diponegoro, Jilid 1-2, 2003), hlm. 261.

buat mengubah pendirian itu, saya (tegas A.Hassan) tidak akan mundur daripada menerimanya.<sup>96</sup>

Ibnu Rusyd memetakan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan apakah sebagai syarat sahnya pernikahan atau tidak, menjadi empat kelompok. *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. *Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan pria yang sekufu maka sah nikahnya. *Ketiga*, pendapat Abu Daud adh-Dhahiri dengan membedakan antara janda dan gadis. Kalau perempuannya masih gadis maka perlu ada wali, sedangkan bagi perempuan janda tidak perlu. Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat al-Qasim dari Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan sebagai sesuatu yang sunnah saja. Dengan demikian persoalannya adalah apakah wali termasuk syarat sahnya pernikahan (*syuruth al-shihhah*) atau sebagai syarat sempurnanya pernikahan (*syuruth al-iltimam*).<sup>97</sup>

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis /*virginitas*

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 262-263.

<sup>97</sup> Ibn Rusyd, *op. cit.*, hlm. 7

(*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Ridwan, *op.cit.*, hlm. 155.

### **BAB III**

## **PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN WALI DALAM PERNIKAHAN**

#### **A. Biografi Imam al-Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya**

##### **1. Latar Belakang Imam al-Syafi'i**

Imam al-Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhabi menurut urutan kelahirannya.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.<sup>2</sup>

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>3</sup>

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan

---

<sup>1</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

<sup>2</sup>Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadiś. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.<sup>4</sup>

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk Badiyah.

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-

---

<sup>4</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.<sup>5</sup>

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>6</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul

---

<sup>5</sup>Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28.

<sup>6</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.<sup>7</sup>

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam al-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

<sup>8</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.



## 2. Pendidikan

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>9</sup>

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.<sup>10</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Mahmud Syalthut, *op.cit.* hlm. 18.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.* hlm, 486-487.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam al-Syafi'i.<sup>12</sup>

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>13</sup>

### 3. Karyanya

Karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-

---

<sup>12</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 18.

Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqh Imam al-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>14</sup>

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>15</sup> (3) Kitab *Imla al-Shagir*; *Amali al-Kubra*; *Mukhtasar al-Buwaithi*;<sup>16</sup> *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.<sup>17</sup> Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Imam al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.<sup>18</sup> Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah

---

<sup>14</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

<sup>15</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

<sup>16</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

<sup>17</sup>Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

<sup>18</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

*Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.*<sup>19</sup>

## **B. Karakteristik Pemikiran Imam al-Syafi'i Ditinjau dari Dimensi Sosio-Historis – Kultural**

Posisi "tengah" Imam al-Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar madzhabinya. Dalam buku metodologinya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral Al-Qur'an-Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw. tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah.

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan

---

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Imam al-Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

*Pertama*, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

*Kedua*, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam Al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

*Ketiga*, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

*Keempat*, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu

dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul."

Menurut Imam al-Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Imam al-Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Imam al-Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru. Penggunaan *ijma'*, misalnya, tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas.

Bagi Syafi'i, *ijma'* merupakan metode dan prinsip, dan karenanya, ia tidak memandang konsensus orang-orang umum sebagai *ijma'*, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Imam Malik dan ulama-ulama Madinah. Ini dengan jelas terlihat dalam percakapan dengan sekelompok ahli hukum Madinah dalam bukunya *Al-Umm* dan dikutip lengkap oleh Fazlur Rahman:

Imam al-Syafi'i :

"Akankah kita katakan bahwa anda menganggap, misalnya Ibnu Musayyib sebagai ulama yang otoritatif di Madinah, *Atha'* yang otoritatif di Makkah, Hasan di Bashrah dan Sya'bi di Kufah semuanya dari generasi *tabi'ien* dan memandang apa yang mereka sepakati sebagai *ijma'*?"

Lawan: "Ya."

Imam al-Syafi'i :

"Tetapi anda menyatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu dalam pertemuan mana pun yang anda ketahui. Karena itu, anda menyimpulkan *ijma'* mereka dari laporan-laporan tentang mereka, dan, sesungguhnya, karena anda telah melihat bahwa ulama-ulama tersebut membuat pernyataan-pernyataan mengenai masalah-masalah yang tidak anda temui pembahasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka anda menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan *qiyas* terhadap masalah-masalah tersebut dan anda berargumentasi bahwa *qiyas* adalah kumpulan pengetahuan yang benar dan mapan yang disepakati oleh para ulama."

Lawan: "Itulah yang kami katakan. Pengetahuan datang dalam beberapa bentuk.

*Pertama*, apa yang dituturkan oleh seluruh masyarakat dari seluruh masyarakat generasi-generasi yang telah lalu (pengetahuan yang dibentuk) dengan kepastian yang dapat saya sumpahkan dengan nama Allah dan Rasul-Nya. Contoh dari pengetahuan semacam ini adalah kewajiban-kewajiban agama.

*Kedua*, bagian dari Al-Qur'an yang mengakui perbedaan-perbedaan penafsiran haruslah diterima dalam artinya yang langsung dan sesuai dengan akal sehat: ia tidak bisa diberi "batiniyah" dan allegoris walaupun ia mungkin dapat menerima arti seperti itu kecuali bila hal itu menjadi konsensus masyarakat.

*Ketiga*, pengetahuan yang disepakati oleh kaum Muslimin dan mereka telah menyatakan persetujuan sebelumnya terhadapnya. Bahkan apabila yang disebut terakhir ini mungkin tidak datang dari Al-Qur'an ataupun Sunnah, bagi saya ia memiliki kedudukan yang sama dengan Sunnah yang telah disepakati. Ini disebabkan karena kesepakatan kaum Muslimin tidak dapat dicapai semata-mata dengan pendapat-pendapat pribadi (tapi hanya dengan melalui qiyas), karena pendapat-pendapat pribadi hanya membawa pada perselisihan.

*Keempat*, pengetahuan para ahli yang merupakan argumen yang konklusif kecuali bila disampaikan dengan cara kebal terhadap kekeliruan.

Terakhir, qiyas. Tidak ada perselisihan yang dapat memasuki pengetahuan dalam bentuk-bentuk yang telah saya uraikan tadi, dan segala sesuatu akan tetap Berakar pada prinsip-prinsipnya kecuali bila masyarakat



umum setuju untuk melepaskannya dari prinsip-prinsipnya. Ijma' adalah argumen final mengenai segala sesuatu, karena ia kebal terhadap kekeliruan."

Imam al-Syafi'i : Mengenai jenis pengetahuan yang pertama yang anda jelaskan tadi, yakni transmisi dari seluruh masyarakat generasi sebelumnya, memang dapat diterima. Tapi apakah anda tahu, dan dapatkah anda menjelaskan pengetahuan jenis kedua yang sehubungan dengannya, dimana anda mengatakan bahwa seluruh masyarakat bersepakat atasnya dan mentransmisikan kesepakatan umum yang sama mengenai hal itu pada generasi-generasi sebelumnya? Dan apa yang anda maksud dengan seluruh masyarakat itu? Apakah ia meliputi baik ulama maupun non-ulama...?

Lawan: "Ini adalah ijma' para ulama saja ... karena hanya merekalah orang-orang yang dapat mengetahui dan bersepakat pendapat tentang masalah itu. Jadi, ketika mereka bersepakat pendapat, maka hal ini menjadi otoritatif bagi mereka yang tidak mengetahuinya (yakni bagi non-ulama); tetapi jika mereka tidak bersepakat pendapat, maka pendapat-pendapat mereka tidak mempunyai otoritas bagi siapa pun, dan masalah-masalah seperti itu harus dirujuk pada suatu qiyas (penalaran analogis) yang baru berdasarkan apa yang telah disepakati bersama ... Tidaklah penting apakah ijma' didasarkan pada sebuah hadits verbal yang mereka riwayatkan ataukah tanpa sebuah hadits pun ..., dan bahkan bila mereka berselisih, tidaklah penting apakah hadits verbal yang sesuai dengan pendapat sebagian dari mereka ataukah tidak ada. Karena saya tidak menerima sesuatu hadits pun ..., dan bahkan bila mereka berselisih, tidaklah penting apakah ada hadits verbal yang sesuai dengan sebagian dari

mereka ataukah tidak ada. Karena saya tidak menerima sesuatu hadits pun kecuali ada kesepakatan pendapat atasnya ..."

Selanjutnya, pada periode ini, interaksi antara qiyas dan ijma' dipandang tidak sebagai sebuah prinsip yang statis, tapi sebagai suatu proses asimilasi, interpretasi dan adaptasi yang dinamis dan wajar. Hal ini terlihat dengan jelas dalam bagian lain dari tulisan Imam al-Syafi'i yang, walaupun agak berkepanjangan, adalah yang paling komprehensif mengenai masalah tersebut dan mengungkapkan sikap sebenarnya dan yang serba meliputi dari ijma'.

Nuansa dan paradigma pemikiran Imam al-Syafi'i itu selalu terlihat dalam pemikiran-pemikirannya yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya. Penalaran analogis (qiyas) Imam al-Syafi'i, juga, menawarkan pemahaman baru. Apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya oleh Imam al-Syafi'i disebut *qiyas bilfuru'*, penalaran analogis terhadap masalah-masalah partikular dengan berpijak pada suatu prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preseden.

Sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut *'illat*. Sedangkan metode-metode yang lain, seperti *istihsan*, *istishab*, *sadd al-zarai'* dan metode lainnya dimasukkan ke dalam *qiyas bil qawa'id* (penalaran analogis terhadap prinsip umum yang terkandung dalam suatu preseden itu sendiri).

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.<sup>20</sup>

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.<sup>21</sup>

Imam al-Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadits dan ilmu hadits. Salah satu kitab hadits yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam al-Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam al-Syafi'i.<sup>22</sup> Hadits-hadits yang terdapat dalam musnad al-Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadits.

Dengan kegigihannya dalam membela hadits nabi sebagai hujjah, Imam al-Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan

---

<sup>20</sup>Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* sebagai dalil hukum atau sebagai metode Istinbat hukum, karena itu ia tidak menggunakannya.

<sup>21</sup>Metode ini bersifat menjelaskan secara mendalam

<sup>22</sup>Imam al-Syafi'i tidak hanya menguasai ilmu fiqh tetapi juga mempelajari ilmu hadis

kedudukan serta fungsi hadits nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai *Nasir al-Sunnah*. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.

Hadits nabi menurut Imam al-Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam al-Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.<sup>23</sup>

Dari sisi lain Imam al-Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadits. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadits-hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam al-Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadits standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i*

---

<sup>23</sup>Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

dan *Sunan at-Tirmizi*.<sup>24</sup> Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah *Sunan Ibn Majah*, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah *Sunan al-Darimi*.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadits sebagai kitab pokok, kitab hadits tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.<sup>25</sup> Sehingga dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadits sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari*, *Sahib Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *al-Muwatta'*, *Sunan al-Darimi* dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad

---

<sup>24</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

<sup>25</sup>M. Alfatis Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 298.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 298 – 299..

ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits sahih.

Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya,

kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.<sup>27</sup>

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 85.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 86

### C. Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Keharusan adanya Wali dalam Pernikahan

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dalam kitabnya *Al-Umm*, Juz. 5, yang diterbitkan Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth., telah mengupas persoalan keharusan adanya wali dalam pernikahan dan dapat dibaca mulai halaman 13 sampai dengan halaman 14. pada halaman tersebut, ia mengawali uraiannya dengan meletakkan dalil al-Qur'an sebagaimana di bawah ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 232)

Artinya; Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya , apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>29</sup>

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (النساء: 25)

Artinya: Sebab itu kawinilah mereka (budak wanita) itu, dengan izin tuannya (QS. An-Nisa': 25).<sup>30</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

<sup>29</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 121.



نُشَوِّزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء: 34)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34).<sup>31</sup>

قال الشافعي: رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إلى بالمعروف وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية وقال في الإمام فانكحوهن بإذن أهلهن<sup>32</sup>

Artinya: Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : "Dan apabila kamu menceraikan perempuan dan kemudian sampai waktunya (iddahnya), janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama, jika telah ada persetujuan diantara mereka menurut patutnya". S. Al-Baqarah, ayat 232. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, al-ayat. Allah berfirman mengenai wanita-wanita budak: Sebab itu kawinilah mereka (budak wanita) itu, dengan izin tuannya. (QS. An-Nisa': 25).

قال الشافعي: زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعض مضي عدتها فأبي معقل وقال زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجهها أبدا فنزل وإذا طلقتم يعني الأزواج النساء فبلغن أجلهن يعني فانقضت أجلهن يعني

<sup>31</sup>Ibid., hlm. 123.

<sup>32</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 14.

عدتھن فلا تعضلوهن يعني أولياءھن أن ينكحن أزواجهن إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقھن وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف<sup>33</sup>

Artinya: Syafi'i berkata: Didakwakan oleh sebagian ahli ilmu Al-Qur'an, bahwa Muaqqil bin Yassar mengawinkan saudaranya yang perempuan dengan anak pamannya yang laki-laki. Lalu suami itu menceraikan isterinya. Kemudian, dikehendaki oleh suami dan dikehendaki oleh isteri untuk kawin kembali, sesudah berlalu iddahnya. Maka Muaqqal tidak setuju dan ia berkata : "Saya sudah mengawinkan engkau dan saya mengutamakan engkau dari orang lain. Lalu engkau menceraikannya. Maka saya tidak akan mengawinkan engkau lagi dengan dia untuk selama-lamanya". Maka turunlah : "Dan apabila kamu", yakni : para suami, menceraikan perempuan dan kemudian sampai waktunya (iddahnya), yakni : maka berlalu waktunya, yakni : iddahnya. Maka janganlah dihalangi, yakni : oleh wali perempuan itu, kawin dengan suaminya yang lama, kalau mereka sudah menceraikannya dan tiada mereka memutuskan perceraianya itu. Dan apa yang menyerupai makna yang mereka katakan dari ini, dengan yang mereka katakan. Saya tiada mengetahui akan ayat yang memungkinkan yang lain. Karena sesungguhnya diperintahkan, bahwa tidak dihalangi wanita itu oleh orang yang memperoleh sebab kepada menghalangi, dengan bahwa sempurna perkawinan perempuan itu dengan wali. Suami, apabila ia telah menceraikan isterinya, maka berlalu iddahnya, niscaya tiada jalan bagi suami itu kepada bekas isterinya. Lalu wali wanita itu menghalanginya. Dan kalau belum berlalu iddahnya, kadang-kadang haram kepada wanita itu untuk kawin dengan orang lain. Dan wali itu tiada menghalangi wanita tersebut dari dirinya. Dan ini lebih jelas apa yang dalam Al-Qur'an, bahwa bagi wali bersama wanita itu pada dirinya ada hak. Bahwa harus atas wali tidak menghalangi wanita itu, apabila ia telah menyetujui untuk kawin dengan yang baik.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

قال الشافعي: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل أخبرنا مسلم وسعيد وعبدالمجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحلت من فرجها<sup>34</sup>

Artinya: Syafi'i berkata: Datanglah Sunnah dengan yang seperti makna Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim, Sa'id dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Wanita manapun yang kawin dengan tiada izin walinya maka perkawinannya itu batal. Maka perkawinannya itu batal. Maka kalau lelaki itu sudah menyetubuhinya, niscaya bagi wanita tersebut berhak mas kawin, dengan yang diterima kehalalan oleh lelaki itu dari farajnya".

قال الشافعي: بعضهم في الحديث فإن اشتجروا وقال غيره منهم فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح ورد نكاحها<sup>35</sup>

Artinya: Sebagian mereka mengatakan pada hadits itu : "Maka kalau mereka itu bertengkar". Kata yang lain dari mereka itu : "Kalau mereka itu berselisih, maka sultan (penguasa) itu menjadi wali orang yang tiada mempunyai wali". Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Sa'id dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh 'Akramah bin Khalid, yang mengatakan : "Berkumpul pada jalan orang-orang yang berkendara. Pada mereka itu ada seorang wanita yang sudah tidak gadis lagi. Lalu ia meng-wali-kan seorang laki-laki dari mereka itu akan urusannya. Maka laki-laki tersebut mengawinkan wanita tadi dengan seorang laki-laki. Maka Umar bin Khattab r.a. menghukum dengan pukulan, yang kawin itu dan menolak perkawinannya".

<sup>34</sup>Ibid.,

<sup>35</sup>Ibid., hlm. 15.

قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن معبد ابن عمير أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي أخبرنا مسلم وعبدالمجيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبدالله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبدالعزيز وهو بالمدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فردّه عمر وقد أصابها<sup>36</sup>

Artinya: Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Muabbad bin Umair, bahwa Umar r.a. menolak perkawinan wanita, yang kawin dengan tidak ada wali. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Amr bin Dinar berkata : "Dikawinkan seorang wanita dari Bani Bakar bin Kinanah, yang dipanggil namanya : Binti Abi Tsammamah Umar bin Abdullah bin Mudlarras. Lalu ditulis syrat oleh Alqamah bin Alqamah Al-'Atwari kepada Umar bin Abdul Aziz dan beliau itu di Madinah : "Bahwa saya walinya wanita itu. Dan dia itu kawin, dengan tiada urusan saya". Maka ditolak perkawinan itu oleh Umar. Dan suaminya sudah bersetubuh dengan wanita itu.

قال الشافعي: فأى امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فنكاحها باطل"<sup>37</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut. Karena Nabi Saw. bersabda: "maka nikahnya itu batal"

Dari pendapat Imam al-Syafi'i di atas terlihat dengan jelas, ia menggunakan metode *istinbat* hukum berupa al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nisa ayat 34, surat an-Nisa ayat 25, dan hadits dari Abu Burdah

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,

<sup>37</sup>*Ibid.*,

r.a. dari Abu Musa, r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN WALI DALAM PERNIKAHAN**

#### **A. Analisis Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i Tentang Keharusan Wali dalam Pernikahan**

Menurut Imam al-Syafi'i, wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah wali dalam pernikahan adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa (*al-'aqilah-al-balighah*) bisa menikahkan dirinya sendiri.

Penulis melihat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang kedudukan wali dalam pernikahan disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan ketentuan normatif baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Perbedaan itu lahir karena kerangka metodologis yang digunakan berbeda sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Berikut ini pemetaan perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan argumentasi yuridis (dalil) masing-masing.

1. Pendapat ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan dan menjadikannya sebagai rukun pernikahan dan pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah adalah Imam al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan

Malik ibn Anas<sup>1</sup> yang mendasarkan pada dalil: Dalil al-Qur'an berikut ini:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (البقرة: 221)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sehingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah: 221).<sup>2</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>3</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: 32)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan orang-orang yang shalih di antara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. (QS. an-Nur: 32).<sup>4</sup>

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah

<sup>1</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 147.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 53.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 549.

seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:...., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".<sup>5</sup>

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelas sekali bahwa *khitab* pada lafaz "*fala ta'dhuluhunna*" adalah para wali. Dengan demikian posisi seorang perempuan dalam hal pernikahan berada pada kekuasaan walinya. Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.<sup>6</sup> Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akal nya (*nuqshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam *bertasharruf* sama dengan orang tidak mampu mengelola hartanya.<sup>7</sup>

---

13. <sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, hlm.

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 7

<sup>7</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 149.



Hadits Rasulullah:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي". (رواه الامام الخمسة الا النسائي)<sup>8</sup>

Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها.(أخرجه الاربعة الا النسائي , وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)<sup>9</sup>

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hadits Rasulullah:

<sup>8</sup>Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaga al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 193.

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات) <sup>10</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

Semua Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

2. Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.<sup>11</sup> Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Dasar al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 119 – 120.

<sup>11</sup> Ridwan, *op.cit.*, hlm. 151..

kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>12</sup>

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.<sup>13</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya kawin dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah: 230).<sup>14</sup>

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan perkawinan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa perlu persetujuan walinya.<sup>15</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 234)

Artinya: Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka

<sup>12</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>15</sup>Ridwan, *op.cit.*, hlm. 152.

(perempuan) lakukan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 234).<sup>16</sup>

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu* (sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.<sup>17</sup>

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.<sup>18</sup> Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.<sup>19</sup>

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan perangkat metodologi deduksi analogis (*qiyas*) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk

---

<sup>16</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56

<sup>17</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 153 – 154.

<sup>18</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 118

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu'.<sup>20</sup>

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.<sup>21</sup>

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Al-Qur'an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw:

---

<sup>20</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 154 – 155.

<sup>21</sup> Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيتام حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذن؟ قال: أن تسكت . (متفق عليه)<sup>22</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga di perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw;

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. (رواه مسلم) . وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. (رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان)<sup>23</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 118

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 119

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata: dari pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan atau ragu-ragu yang perlu di terangkan :

- 1). Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
- 2). Menurut ka'idah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.
- 3). Apa maqshud perkataan Ibnul-Mundzir:<sup>24</sup>

Kita Jawab (kata A.Hassan):

- 1). Kita mengaku, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita (kata A.Hassan) dinamakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam penjagaannya mau menikah dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu buat mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.
- 2). Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di nikahkan oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.
- 3). Adapun perkataan Ibnul-Mundzir yang maksudnya: Tidak ada kelihatan khilaf antara Shahabat tentang wajib "wali" itu, tak boleh di jadikan alasan, karena di atas tadi kita sudah tahu, beberapa riwayat menerangkan

---

<sup>24</sup>Ahmad Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT Penerbit Diponegoro, Jilid 1-2, 2003), hlm. 261.

kejadian nikah dengan tidak pakai wali, dan juga ada riwayat Ibnu Abi Syaibah yang mengatakan beberapa Shahabat dan Tabi'ien mempunyai anggapan tak perlu kepada wali. Saya sudah pembicaraan ini dengan pengakuan, bahwa pegangan saya hingga hari ini: “Tidak perlu wali di dalam pernikahan, tetapi sunnat saja kalau dapat penerangan yang kuat buat mengubah pendirian itu, saya (tegas A.Hassan) tidak akan mundur daripada menerimanya.”<sup>25</sup>

Ibnu Rusyd memetakan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan apakah sebagai syarat sahnya pernikahan atau tidak, menjadi empat kelompok. *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. *Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan pria yang sekufu maka sah nikahnya. *Ketiga*, pendapat Abu Daud adh-Dhahiri dengan membedakan antara janda dan gadis. Kalau perempuannya masih gadis maka perlu ada wali, sedangkan bagi perempuan janda tidak perlu. Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat al-Qasim dari Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan sebagai sesuatu yang sunnah saja. Dengan demikian persoalannya adalah apakah wali termasuk syarat sahnya pernikahan (*syuruth al-shihhah*) atau sebagai syarat sempurnanya pernikahan (*syuruth al-iltimam*).<sup>26</sup>

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 262-263.

<sup>26</sup> Ibn Rusyd, *op. cit.*, hlm. 7



hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis /*virginitas* (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.<sup>27</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i, pernikahan tanpa wali maka pernikahan demikian batal, karena pernikahan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam al-Syafi'i berpendapat seperti ini didasarkan pada *istinbat* hukum berupa al-Qur'an dan hadits di bawah ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 232)

Artinya; Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih

---

<sup>27</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 7.

baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. al-Baqarah: 232).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 34)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34).

فَإِنْ كُنَّ حُوهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (النساء: 25)

Artinya: Sebab itu kawinilah mereka (budak wanita) itu, dengan izin tuannya (QS. An-Nisa': 25).

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. (رواه أحمد والأربعة, وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بارساله)<sup>28</sup>

Artinya: Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah).

<sup>28</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *op.cit.*, hlm. 117

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal. Sedangkan yang dimaksud hadis mursal, adalah:

Secara bahasa kata *mursal* adalah *isim maf'ul* dari *arsala*, yang berarti *athlaqa*, yaitu "melepaskan atau membebaskan". Dalam hal ini adalah melepaskan isnad dan tidak menghubungkannya dengan seorang perawi yang dikenal. Sedangkan pengertiannya menurut istilah Ilmu hadits adalah hadits yang gugur dari akhir sanadnya, seorang perawi sesudah tabi'in.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bentuk Hadis *mursal* tersebut adalah, bahwa seorang Tabi'in, baik kecil atau besar, mengatakan "Rasulullah SAW berkata demikian, atau berbuat demikian, dan sebagainya, sementara Tabi'in tersebut jelas tidak bertemu dengan Rasul SAW. Jadi, dalam hal ini Tabi'in tersebut telah menghilangkan Sahabat, sebagai generasi perantara antara Tabi'in dengan Rasul SAW, di dalalam sanad Hadits tersebut.

Pada dasarnya hukum Hadits Mursal adalah Dha'if dan ditolak (*Mardud*). Hal tersebut adalah karena kurangnya (hilangnya) salah satu syarat ke-shahih-an dan syarat diterimanya suatu Hadits, yaitu persambungan sanad. Selain itu, juga karena tidak dikenalnya (*majhul*) tentang keadaan perawi yang dihilangkan tersebut, sebab boleh jadi perawi yang dihilangkan itu adalah bukan Sahabat. Dengan adanya kemungkinan demikian, maka ada kemungkinan Hadits tersebut adalah Dha'if. Akan tetapi, para Ulama, baik di kalangan ahli Hadits atau yang lainnya, berbeda pendapat tentang status

Hadits Mursal dan hukum ber-hujjah dengannya. Hal tersebut adalah karena keterputusan sanad-nya adalah pada akhir sanad-nya yang pada umumnya adalah Sahabat, sementara Sahabat keseluruhannya adalah adil dan karenanya tidaklah mengakibatkan Hadits tersebut menjadi cacat apabila tidak disebutkan nama Sahabatnya.

Adapun dalil al-Qur'an yang dijadikan landasan surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nisa ayat 34, surat an-Nisa ayat 25 merupakan ayat yang menunjukkan bahwa wali mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam melindungi hak-hak kaum wanita. Ayat-ayat ini menyiratkan bahwa wali dapat melindungi kaum wanita dari i'tikad buruk kaum pria.

Dari pendapat Imam al-Syafi'i di atas terlihat dengan jelas, ia menggunakan metode *istinbat* hukum berupa al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nisa ayat 34, surat an-Nisa ayat 25, dan hadits dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban

Dari pendapat-pendapat di atas, maka menurut penulis, pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting. Pertama, adanya wali adalah untuk menghindari jangan sampai kaum wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. Dengan adanya wali, maka dapat diselidiki siapa sebenarnya laki-laki itu. Kedua, dengan adanya wali maka

orang tidak akan mempermainkan arti sebuah pernikahan. Tanpa wali, orang akan dengan mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya nikah di bawah tangan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali sehingga Mahmud Mahdi al-Istanbuli berpendapat;

Hikmah diyaratkan adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkan dirinya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak menipunya dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran semacam ini, wahai kaum wanita.<sup>29</sup>

Dengan demikian pendapat yang lebih kuat adalah yang menganggap bahwa nikah tanpa wali adalah batal.

#### **B. Kontekstualisasi Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Keharusan Wali dalam Pernikahan Terhadap Hukum Pernikahan Kontemporer**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di

---

<sup>29</sup>Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, Terj. A.H. Ba'adillah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 57.

kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat. al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة: 221)

Artinya: Janganlah kamu menikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sehingga dia beriman. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. (QS. al-Baqarah (2): 221).<sup>30</sup>

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

---

<sup>30</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 53.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
(البقرة: 232)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).<sup>31</sup>

Surat.an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk nikah) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. an-Nur (24): 32).<sup>32</sup>

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk nikah, ayat kedua larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan nikah dan menikahkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 549.

terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat mi pernikahan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam pernikahan.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talaq kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah nikah dengan suami lain.<sup>33</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة: 232)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).<sup>34</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 234)

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>34</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.



Artinya: Bila telah sampai iddahnya tidak ada halangannya bagimu. Terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.<sup>35</sup>

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya nikah). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari pernikahan itu-adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

- a. Hadits Nabi dari Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits kecuali an-Nasa'i bunyinya:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي". (رواه احمد و الامام الخمسة الا النسائي)<sup>36</sup>

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

wali (HR. Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

- b. Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasai

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
(رواه احمد)<sup>37</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal. (HR. Ahmad).

- c. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (ابن ماجه)<sup>38</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Jamil bin al-Hasan al-Atakki dari Muhammad bin Marwan al-Uqaili dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: perempuan tidak

<sup>37</sup>Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadits No. 1670 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>38</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadits No. 1750 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

boleh menikahkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah).

Undang-undang No. I/1974 tentang pernikahan, yang berlaku sejak 1 April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI. No. 9/1975, mengemukakan beberapa prinsip yang pada pokoknya menjamin dan mengantarkan tercapainya cita-cita luhur pernikahan itu sendiri. Salah satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan masalah ini ialah prinsip partisipasi keluarga. Pada intinya pernikahan adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, karena dia memasuki dunia baru, membentuk suatu unit keluarga terkecil sebagai bagian suatu bangsa yang besar yang religius dan kekeluargaan seperti bangsa Indonesia.

Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

. Di Indonesia yang pada umumnya pengikut madzhab al-Syafi'i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah pernikahan. Seperti tercermin dalam pasal-pasal KHI, yaitu pasal 14, 19 sampai 23. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam KHI, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

Pendapat Imam al-Syafi'i sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم  
دفع المفسدة غلبا<sup>39</sup>

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *maslahah*, didahulukan menolak yang mafsadah.

Dengan pemetaan pendapat para ulama fiqh terkait dengan konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing di atas, maka jelaslah bahwa wacana ini sudah menjadi perdebatan akademik dalam khazanah *fiqh klasik*. Oleh karena itu persoalan apakah pentingnya wali dalam pernikahan dalam konteks ke-Indonesia-an akan sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya didasarkan pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti

---

<sup>39</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, t.th, hlm. 39.

dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan dan kontekstual.

Dari sini diperlukan adanya kearifan-kearifan untuk memutuskan dan merumuskan sesuai dengan kecenderungan umum (*trends*) masyarakat Indonesia. Cara pandang seperti ini diperlukan agar tawaran paket undang-undang ataupun rumusan hukum tersebut tidak tercerabut dari akar kultural bangsa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Menurut Imam al-Syafi'i, pernikahan tanpa wali maka pernikahan demikian batal, karena pernikahan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa seperti ini didasarkan pada *istinbat* hukum berupa al-Qur'an, yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nisa ayat 34, surat an-Nisa ayat 25, dan hadis dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban
2. Pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan.

Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat Barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah pernikahan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

## **B. Saran-Saran**

Di Indonesia mayoritas umat Islam menganut madzhab Syafi'i, karena itu pendapat dan buah pikirannya dapat dijadikan materi dalam membentuk peraturan perundang-undangan pernikahan yang bisa diterima semua pihak. Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan sudah diterima umat Islam, namun karena masyarakat itu selalu berubah maka pada saat nanti hendak merevisi KHI, pendapat dan pikiran Imam al-Syafi'i dapat dijadikan masukan sebagai pembanding.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam

paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Annas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tth.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006,
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Fuchan, Arief, dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hasan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT Penerbit Diponegoro, Jilid 1-2, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1994.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Terj. A.H. Ba'adillah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 1996.
- Jaziri, Abdurrrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Kattani, *al-Risalah al-Mustatrafah*, Karachi: Nur Muhammad, 1960.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- , *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, t.th.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 1, t.th.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan ), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo, 2005.
- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, Al-Faqih, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz 2, 1409H/1989M.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Sarthawi, Mahmud Ali, *Syarkh Qanun al-Ahwal al-Shakhshiyah*, Aman Jordania: Daar al-Fikr, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001.
- , *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001
- , *Mutiara Hadis*, jilid 5, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997

- Sosroatmodjo, Arso, dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- , *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Syairazi, Ibrahim ibn 'Ali Ibn Yusuf, *Al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz. 2, Beirut: Daar al-Fikr, tth.
- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarakhsi, Muhammad Ibn Abi Sahl, *Al-Mabshuth*, Juz. 5, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1404. H.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth.
- Syurbasyi, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Tahanawi, *Qawaid fi 'Ulum al-Hadis*, Beirut: Maktab al-Nahdah, 1972.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.
- Wakhid, Muhammad Abdul, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, Beirut: Daar al-Fikr, tth.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- Zahrah, Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th.
- , *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya

Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirmanto

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 07 Pebruari 1980

Alamat Asal : Desa Mororejo RT 04 RW 08 Kaliwungu Kendal

Pendidikan : - MI Mororrejo 01 lulus tahun 1993

- MTs NU Bonang Demak lulus tahun 1996
- MAN 02 Bangetayu Semarang lulus tahun 1999
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kirmanto**